

Pemaksimalan dan Penerobosan Akses Pasar Produk Olahan Industri Kecil Menengah (IKM) Pada Retail Modern Dan Industri Perhotelan Di Sulawesi Selatan

Rezal Hadi Basalamah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andi Djemma Palopo

Email :rezalbasalamah@gmail.com

Abstrak

Daya saing sektor industri kecil menengah (IKM) terus diperbaiki untuk menghadapi era industri 4.0, karena memegang penting dan strategis dalam perekonomian baik secara nasional maupun regional. Pemerintah harus dapat menjawab sebagian besar dari permasalahan yang dihadapi IKM. Untuk itu IKM yang memiliki permasalahan akan didampingi dengan memfasilitasi agar IKM memiliki produksi dan manajemen yang baik (SNI), tingkat daya saing yang baik di tingkat lokal yaitu melakukan Pemaksimalan dan Penerobosan Akses Pasar sehingga dapat masuk dan bersaing didalam industri perhotelan dan retail modern secara langsung dan diharapkan dalam jangka panjang IKM akan mampu melakukan ekspor.

Kata Kunci : Era Industri 4.0, Industri Kecil Menengah (IKM)

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah yang menjadi hal yang fundamental pada pembangunan jangka panjang, seperti kebijakan pemerintah dalam bidang sumber daya manusia. Asumsi dasar dari pendekatan pembangunan ini adalah peran sumber daya manusia terhadap pembangunan khususnya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas penduduk suatu negara, agar negara mampu untuk mencapai kemajuan sebagaimana yang telah dicapai oleh negara-negara maju (Surahmi, 2003).

Pada pembangunan sektor ekonomi, Industri Kecil Menengah (IKM) memegang penting dan strategis dalam perekonomian baik secara nasional maupun regional, hal ini di tandai dengan kokohnya fundamental IKM yang tetap *eksis* walaupun terjadi krisis ekonomi baik secara nasional maupun regional, disisi lain pengembangan dan pemberdayaan serta keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini memang masih perlu lebih ditingkatkan lagi utamanya terkait dengan akses terhadap pasar secara maksimal dan lembaga keuangan didalam konteks ekspansi usahanya. Selain itu, sebenarnya masalah-masalah teknis antara lain manajemen usahanya, kualitas produk yang dihasilkan sudah kompetitif dan dapat bersaing dengan produk-produk dari luar baik secara kualitas maupun desain produknya (*packaging*) sudah bisa di atasi dengan baik oleh para pelaku Industri kecil menengah.

Pada era digital 4.0 sekarang kita sangat merasakan persaingan yang ketat, perkembangan dunia sudah tidak bisa diprediksi lagi dalam satu minggu ke depan, serta terbukanya pasar didalam negeri dari dampak globalisasi. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah harus pro terhadap pembangunan sosial hal ini diperlukan untuk *rebounding* dominasi globalisasi dan kapitalisme sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial (Suharto,2005).

Konsekuensi data globalisasi saat ini secara otomatis menjadi ancaman bagi IKM dalam negeri, oleh karena itu pembinaan dan pengembangan IKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk meningkatkan kemandirian IKM dimasa mendatang. Disinilah peran pemerintah sebagai fasilitator agar manajemen publik yang dibangun bisa berjalan dengan baik efektif dan efisien. Ketika pemerintah berhasil menjadi fasilitator yang baik maka diharapkan perekonomian rakyat dapat meningkat (pendapatan masyarakat), membuka kesempatan kerja, memakmurkan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan daya saing yang kuat. Tinggi rendahnya daya saing suatu industri/institusi tergantung kepada faktor-faktor yang memengaruhinya, salah satu yang mempengaruhinya adalah *governance* dan kebijakan pemerintah (Sumihardjo, 2008)

Saat ini terdapat 51.278 unit usaha industri kecil menengah (IKM) yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Disdag, 2018). Hal ini diikuti dengan sistem pemasaran yang bisa diilustrasikan belum

menyentuh atau bisa dikatakan susah untuk masuk ke industri perhotelan dan pasar retail modern dalam artian pemerintah belum bisa memfasilitasi atau menjamin masuknya produk-produk IKM dalam industri perhotelan dan pasar modern sehingga produk tersebut tidak dapat bersaing secara baik di pasaran.

Permasalahan saat ini yang paling mendasar untuk dipecahkan adalah susahnya produk-produk olahan industri kecil menengah untuk masuk di industri perhotelan dan pasar modern Sulawesi Selatan sehingga saat ini sangat diperlukan peranan pemerintah untuk memecahkan permasalahan ini dengan cara memfasilitasi dan membuat kebijakan agar hasil produk dari IKM dapat masuk dan bersaing didalam industri perhotelan dan retail modern secara langsung.

Ketika permasalahan ini dapat dipecahkan dengan baik oleh pemerintah khususnya pemerintah Sulawesi Selatan maka kebijakan inovasi ini dapat dijadikan referensi secara nasional untuk memaksimalkan hasil-hasil olahan produk IKM untuk bersaing secara terbuka dengan produk-produk dari perusahaan besar maupun produk-produk dari luar negeri.

KONSEP DAN TEORI

Kedudukan Administrasi Publik dalam pemerintah tidak hanya terpaku pada aturan legalitas yang kaku saja, akan tetapi berorientasi secara dinamis untuk melaksanakan aturan yang ada. Pada disiplin ilmu administrasi publik hakikatnya merupakan suatu disiplin yang menanggapi masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat atau yang disebut dengan *public business* (Thoha, 2008).

Administrasi publik dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang besar dalam sistem pemerintahan. Salah satu tujuan utama untuk menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab yang baik maka setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah tepat dan dapat memecahkan solusi di masyarakat dan berdampak signifikan (Basalamah, 2017).

Secara garis besar tujuan pada inovasi Pemaksimalan Dan Penderobosan Akses Pasar Produk Olahan Industri Kecil Menengah (IKM) Pada Retail Modern Dan Industri Perhotelan di Sulawesi Selatan harus dapat memberikan nilai yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat baik itu jangka pendek, menengah dan tujuan jangka panjang.

- a) Tujuan jangka pendek yaitu Terwujudnya perjanjian kemitraan kerjasama antara Asosiasi IKM Sulsel dengan Ritel Modern, Terwujudnya perjanjian kerjasama antara Asosiasi IKM Sulsel dengan Asosiasi Industri Perhotelan (PHRI) Sulawesi Selatan, dan Terwujudnya perjanjian kerjasama antara Asosiasi IKM Sulsel dengan Bank Sulselbar (terlebih dahulu).
- b) Tujuan jangka menengah yaitu Terwujudnya perjanjian kerjasama antara Asosiasi IKM Sulsel dengan semua Bank yang menyalurkan kredit usaha dengan bunga rendah. Terwujudnya perjanjian kerjasama pembinaan dan pengembangan kapasitas produksi antara Asosiasi IKM Sulsel dengan Pengelola CSR BUMN, Meningkatkan kegiatan mediasi dan fasilitasi akses perizinan produk olahan IKM : Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Merk Dagang (MD), Sertifikat Halal dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), Terwujudnya kampanye secara masif terkait olahan dan konsumsi produk hasil olahan industri kecil menengah di 24 kabupaten/kota Sulsel dan meningkatnya kemitraan IKM dengan ritel modern dan industri perhotelan.
- c) Tujuan jangka panjang yaitu Berkembangnya proses mediasi dan fasilitasi akses perizinan produk olahan industri kecil menengah: Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Merk Dagang (MD), Sertifikat Halal, Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), Berkembangnya model kampanye secara masif terkait olahan dan konsumsi produk olahan industri kecil menengah (IKM) di 24 kabupaten/kota Sulsel, dan Meningkatnya akses pasar produk IKM di pasar nasional dan internasional untuk mewujudkan target ekspor Sulsel dan yang terpenting model kebijakan ini dapat diimplementasikan di daerah lain diluar Sulawesi Selatan.

RUANG LINGKUP PEMAKSIMALAN & PENEROBOSAN AKSES PASAR (STRATEGI & KEBIJAKAN)

Pemerintah yang responsif dan memberikan ruang bagi berkembangnya masyarakat secara mandiri akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat (Sururi,2017). Untuk

memaksimalkan segala kebijakan publik maka pemerintah harus dapat menginovasi terdapat tahapan yang ada pada kebijakan tersebut seperti tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi (Dun; 2003, Nugroho; 2006, Islamy; 2009). Berikut adalah Ruang lingkup pada inovasi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam hal pemaksimalan dan penerobosan akses:

a) Tahap Formulasi

Tahap ini adalah bagaimana merumuskan kebijakan tentang bolehnya produk-produk hasil IKM dapat masuk pasar retail modern dan industri perhotelan secara mudah dan leluasa dan mudah mendapatkan modal dari perbankan dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan pembentukan tim kerja eksternal dan internal untuk menyamakan persepsi dan mobilitas dukungan dari *stakeholder* dengan instansi pemerintah terkait.

b) Tahap Implementasi

Tahap ini adalah melaksanakan kebijakan yang sudah di formulasikan pada tahap ini kegiatan utamanya adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi kerjasama antara IKM dengan pasar retail modern dan juga industri perhotelan, serta memfasilitasi kerja sama antara IKM dan perbankan dalam hal pemberian modal melalui kesepakatan berupa penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan. Selain itu pada tahap ini secara bersamaan pemerintah melakukan sosialisasi penyebaran informasi secara luas agar kebijakan yang sudah di implementasikan berjalan dengan baik.

c) Tahap Evaluasi

Pada tahap ini lebih ditekankan pada kegiatan untuk mengontrol dan mengevaluasi kegiatan kemitraan strategis antara IKM dengan pasar modern, industri perhotelan serta perbankan melalui tim terpadu pemantau dan evaluasi program kebijakan pemaksimalan dan penerobosan akses pasar dengan melibatkan Asosiasi IKM, Retail modern, PHRI serta KADIN, perbankan dan OJK. Selain itu tim ini juga dapat mengevaluasi IKM yang kurang kompetitif, kemudian melakukan pembinaan kepada IKM yang produktifitas, kualitas dan daya saingnya masih lemah.

PENUTUP

Simpulan

Untuk peningkatan dan pengembangan produk olahan industri kecil menengah (IKM) adalah permasalahan yang mendesak untuk

dipecahkan adalah terbatasnya akses pasar. Keterbatasan akses pasar ini lah yang perlu untuk segera diatasi, maka disinilah peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini sehingga produk olahan yang dihasilkan oleh IKM dapat bersaing dan memasuki retail pasar modern dan industri perhotelan seperti contoh yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan dalam memfasilitasi produk-produk olahan dalam negeri, salah satunya menaruh produk-produk lokalnya di tempat strategis seperti bandara agar dapat di dapatkan secara mudah sebagai oleh-oleh wisatawan. Selain itu juga pemerintah Jepang dan Korea Selatan selalu menghimbau tentang pentingnya mengkonsumsi dan mencintai produk dalam negeri.

Saran

Inovasi yang harus dibangun dalam Pemaksimalan Dan Penerobosan Akses Pasar“ Produk Olahan Industri Kecil Menengah (IKM) Pada Retail Modern dan Industri Perhotelan di Sulawesi Selatan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama terhadap pihak terkait akan menjadi sarana pembuka akses pasar produk IKM untuk masuk ke industri perhotelan dan pasar retail modern untuk bersaing dengan produk-produk olahan dari luar daerah bahkan dari luar negeri.

Adapun output yang diharapkan yaitu terpasarkannya produk olahan industri kecil menengah pada pasar retail modern dan industri perhotelan melalui penyediaan *space* (tempat) yang strategis pada pasar-pasar retail modern dan hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Basalamah, Rezal Hadi. 2017. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Di provinsi Sulawesi Selatan*. Volume 12, No 2 (2017). Makassar: Jurnal Ibnu Khaldun ISSN 1907-6916.
- Dunn. William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan oleh Wibawa Samudara, *et.al.*, Edisi Kedua. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. 2009. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Laporan Tahunan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Selatan. 2018. Makassar.

- Nugroho, R. 2006.*Kebijakan publik untuk negara – negara berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetidio.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiharjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Puskomedia.
- Surahmi, 2003.*Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pesisir*. Tesis. FIA. Malang : Universitas Brawijaya.
- Sururi, A. 2017.*Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik menuju terwujudnya Good Public Policy Governance*. Jurnal Spirit Publik Surakarta :Universitas Sebelas Maret, 12, 14–31.
- Thoha, Miftah.2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta :Kencana